

POLEMIK MASYARAKAT RIAU DAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TERHADAP PERKEMBANGAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU**I Dewa Ayu Putri Wirantari**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar
E-mail: wirantari1992@gmail.com

Abstrak - Meningkatnya permintaan pasar dunia terhadap konsumsi minyak sawit (CPO) menyebabkan pemerintah terus menerus memperluas perkebunan sawit. Riau menjadi provinsi yang memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Luas perkebunan sawit di Indonesia adalah 13,5 juta ha, dimana 2,9 juta ha ada di Riau. Hal ini tentunya memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat di daerah provinsi Riau. Salah satu dampak positif bagi masyarakat Riau dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit adalah meningkatnya pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya adalah perluasan dilakukan dengan cara membakar dan menebang hutan, yang efeknya sungguh luar biasa. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 lalu, ketika terjadi pembakaran hutan secara besar-besaran yang dilakukan di provinsi Riau mengakibatkan polusi asap yang teramat sangat menyesak. Efek asap tersebut tidak hanya dirasakan di daerah Riau saja melainkan daerah lain dan bahkan negara tetangga juga ikut merasakan dampak dari pembakaran hutan ini. Dari polusi asap tersebut banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari banyaknya masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA, tidak dapat keluar rumah, sekolah, ataupun bekerja, seluruh akses keluar daerah baik darat, laut, maupun udara tertutup akibat tebalnya asap yang mengganggu jarak pandang, yang kesemuanya berujung merugikan masyarakat baik sektor-sektor seperti pendidikan hingga sektor ekonomi

Kata kunci: Minyak, Sawit ISPA, Riau

Abstract - The increasing world demand for palm oil (CPO) has caused the government to continue expanding palm oil plantations. Riau is the province with the largest oil palm plantation in Indonesia. The area of oil palm plantations in Indonesia is 13.5 million ha, of which 2.9 million ha are in Riau. This certainly has an impact for the people in Riau province. One positive impact for the people of Riau with the development of oil palm plantations is the increase in income and the opening of employment. The negative impact is that the expansion is done by burning and cutting down the forest, whose effect is remarkable. As happened in the year 2014, when massive forest fires committed in Riau province resulted in excessive smoke pollution. The smoke effects are not only felt in Riau area but also other regions and even neighboring countries also feel the impact of this forest burning. From the pollution of the smoke is a lot of losses felt by the community, ranging from the many people who contracted the disease ARI, can not leave the house, school, or work, all access outside the area of land, sea or air covered by the thick smoke that hinders visibility, all of which lead to disadvantage of the community, such as education sector to economic sector.

Keywords: Oil, ISPA, Coconut, Riau

PENDAHULUAN

Meningkatnya permintaan pasar dunia terhadap konsumsi minyak sawit (CPO) menyebabkan pemerintah terus menerus memperluas perkebunan sawit. Riau menjadi provinsi yang memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Luas perkebunan sawit di Indonesia adalah 13,5 juta ha, dimana 2,9 juta ha ada di Riau.¹ Hal ini tentunya memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat di daerah provinsi Riau. Salah satu dampak positif bagi masyarakat Riau dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit adalah meningkatnya pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri kelapa sawit merupakan komoditi yang tergolong memberikan perolehan penghasilan yang besar, maka dari itu bukan hal yang mencengangkan jika masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan bisnis dibidang perkebunan sawit. Dampak negatifnya adalah perluasan dilakukan dengan cara membakar dan menebang hutan, yang efeknya sungguh luar biasa. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 lalu, ketika terjadi pembakaran hutan secara besar-besaran yang dilakukan di provinsi Riau mengakibatkan polusi asap yang teramat sangat menyesakkan. Efek asap tersebut tidak hanya dirasakan di daerah Riau saja melainkan daerah lain dan bahkan negara tetangga juga ikut merasakan dampak dari pembakaran hutan ini. Dari polusi asap tersebut banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari banyaknya masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA, tidak dapat keluar rumah, sekolah, ataupun bekerja, seluruh akses keluar daerah baik darat, laut, maupun udara tertutup akibat tebalnya asap yang mengganggu jarak pandang, yang kesemuanya berujung merugikan masyarakat baik sektor-sektor seperti pendidikan hingga sektor ekonomi. Efek dari penebangan hutan juga dirasakan dengan datangnya banjir, karena sudah tidak ada lagi yang mampu menyerap air ketika musim hujan datang akibat pohon-pohon yang telah ditebang. Selain itu, peralihan lahan yang tadinya untuk lahan pangan diubah menjadi lahan perkebunan sawit tentunya turut mengurangi jumlah pangan itu sendiri. Perluasan perkebunan kelapa sawit seharusnya dipikirkan secara matang terlebih dahulu oleh pemerintah. Apabila

pembakaran, penebangan dan alih fungsi hutan ini terus berlanjut maka kita akan kehilangan paru-paru dunia, karena hutan merupakan paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen untuk kita hirup dan bernafas agar tetap hidup di dunia ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah Bagaimana peran pemerintah dan bagaimana dinamika masyarakat di provinsi Riau?

PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Kondisi daerah di Provinsi Riau

Gambaran umum dan kondisi daerah di Provinsi tercermin dari beberapa aspek yang meliputi geomorfologi, demografi, ekonomi dan sumberdaya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, wilayah dan tata ruang, serta pemerintahan.

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi 01°00'00" LS – 02°02'00" LU dan 100°00'00" – 105°00'00" BT. Provinsi Riau setelah dimekarkan tercatat 107.932,71 km², dimana 80,11% diantaranya merupakan wilayah daratan sedangkan 19,89% diantaranya lautan/perairan. Menurut kondisi geomorfologinya daratan Riau dapat dibedakan antara wilayah bagian Timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter d.p.l; wilayah bagian Tengah merupakan dataran bergelombang; dan wilayah bagian Barat merupakan dataran berbukit yang dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah Riau bagian Timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian Barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur, 4 sungai diantaranya memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan, yakni sungai Siak dengan panjang ±300Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ±400 Km dengan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ±6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ±500Km dengan kedalaman 6-8

meter. Wilayah Riau bagian Timur yang merupakan dataran rendah menjadi rentan terhadap bencana banjir dan genangan sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala.

Kawasan di bagian Timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang berbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian Timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air.

Kondisi geologi Riau didominasi oleh bantuan sedimen Kuartar dengan sisipan bantuan sedimen Tersier di bagian Barat dan Selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah Barat sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian Barat sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (folded zone). Kemungkinan terjadi gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan volkanis di daerah Sumatera Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relative kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali di sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Riau selain berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga memberikan tantangan bagi pemerintahan Provinsi untuk memiliki lingkungan hidup yang lestari. Dalam konteks tersebut, maka keberadaan instansi yang secara khusus membidangi lingkungan hidup; peran serta seluruh satuan kerja, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan; serta tersedianya pranata dan perangkat pengaturan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan di

Provinsi Riau.

Demografi

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 mencatat jumlah penduduk Provinsi Riau tanpa Provinsi kepulauan Riau sebesar 3.755.485 jiwa dengan distribusi 56,7% tinggal dipertanian dan 43,3% bermukim di perdesaan. Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat jumlah penduduk tahun 2005 meningkat menjadi 4.614.930 jiwa. Jumlah Penduduk Provinsi Riau pada tahun 2006 adalah 6.369.600 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk setiap tahun cenderung stabil dengan rata-rata 4,01 persen per tahun yang sangat dipengaruhi oleh migrasi masuk. Jika rata-rata laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat dikurangi, maka pada tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi akan menjadi sekitar 12 juta orang, atau bertambah sekitar 34 persen dari tahun 2006.

Fenomena distribusi kependudukan menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan meningkat lebih dari dua kali lipat penduduk perdesaan. Gejala tersebut selain disebabkan oleh perubahan kawasan perdesaan menjadi perkotaan secara fisik dan fungsional, juga memberikan indikasi bahwasanya kebijakan pembangunan selama ini lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Di samping itu, industrialisasi telah memacu pembangunan fasilitas secara fisik maupun non fisik pada beberapa kawasan yang mengubah rona fisik perdesaan menjadi perkotaan.

1. Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja

Angkatan kerja di Provinsi Riau pada tahun 2005 berjumlah 2.515.722 orang atau 66,9% dari jumlah penduduk, terdiri atas 52,5% angkatan kerja laki-laki dan 47,5% perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk, angkatan kerja Provinsi Riau pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 2.008.813 orang. Bagian terbesar penduduk bekerja pada kegiatan pertanian (52,2%) perdagangan, rumah makan dan hotel (13,7%), jasa-jasa (12,6%), perkebunan (18,5%), perdagangan (17,4%), dan konstruksi (8,1%). Yang terendah adalah lapangan usaha lainnya yang mencatat bagian sebesar 0,1%. Tingginya angka migrasi masuk memberikan implikasi terhadap kesempatan kerjanya semakin terbatas

bagi penduduk setempat. Sejalan dengan otonomi daerah, maka peluang bekerja diprioritaskan bagi tenaga kerja tempatan dalam rangka meningkatkan peran serta penduduk setempat dalam pembangunan daerah.

2. Pendidikan

Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Provinsi telah meningkat secara nyata jumlah penduduk yang tamat SLTP dan SLTA sehingga angka partisipasi pendidikan (APK) untuk SD/MI telah mencapai 108,45, SMP/MTs sebesar 98,44 dan SMA/SMK/MA sebesar 76,10 pada tahun 2008.

Namun, tidak dapat dipungkiri mutu sumberdaya manusia relative masih rendah, terutama pada sektor pertanian, merupakan salah satu permasalahan yang cukup mendasar dan serius dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pada Agustus 2007 terdapat sekitar 48,8% dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas berada di sektor pertanian, yang pada umumnya tingkat pendidikan masih di bawah SMP/ sederajat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya serap teknologi di sektor pertanian, kurang berkembangnya inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan usahanya dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan bagi rumah tangga pertanian, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut peran mediator dalam hal ini penyuluh pertanian menjadi sangat penting guna memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Setidaknya, ada 2 (dua) hal yang menyebabkan ketertinggalan di bidang pendidikan. Pertama, adalah ketersediaan dan sebaran sarana dan prasarana pendidikan. Distribusi sekolah masih memerlukan perbaikan. Ada beberapa permukiman yang memiliki jarak yang relative jauh ke sekolah. Di samping itu, fasilitas yang ada juga cenderung semakin tidak terpelihara, khususnya pada daerah-daerah pedalaman dan pulau-pulau. Kedua, kenyataannya, masyarakat memiliki keterbatasan untuk menyekolahkan anaknya karena keterbatasan akses ke sekolah dan faktor keuangan. Data Susenas 2005 menunjukkan kebanyakan penduduk Provinsi Riau hanya tamat Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 1.219.543 atau 33,77% dan tidak punya ijazah (tidak tamat SD) sebanyak

826.517 jiwa atau 22,88%. Kemudian jika ditinjau dari infrastruktur pendidikan di seluruh Provinsi Riau sudah merata walaupun jumlah SD sebesar 2.856 buah, jauh melebihi jumlah SLTP 367 buah maupun SMU 123 buah. Dari data ini sudah menggambarkan bahwa faktor ketersediaan sarana dan prasarana ditingkat SD yang lebih banyak juga memicu terbatasnya tingkat pendidikan, disamping faktor ekonomi.

3. Kesehatan

Mengacu pada indikator IPM (Human Development Index, UNDP), maka kondisi kesehatan masyarakat sebagai salah satu komponen IPM di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1999 IPM Provinsi Riau tercatat sebesar 67,8; tahun 2002 menjadi 68,1; dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 73,6 pada skalanasional (Bappenas dan UNDP), IPM Provinsi Riau berada pada peringkat ketiga, setelah DKI Jakarta (76,1) dan Sulawesi Utara (74,2).

Angka harapan hidup tercatat sebesar 69,8 tahun pada tahun 2004 meningkat menjadi 70,7 tahun pada tahun 2005. Angka harapan hidup meningkat signifikan dibandingkan tahun 1990 sebesar 65,0 dan tahun 1996 sebesar 67,8. Indikator kesehatan secara keseluruhan menunjukkan perbaikan kualitas, antara lain lamawaktu sakit, jumlah penduduk yang berobat, dan pertolongan persalinan oleh tenaga medis. Selain itu, angka kematian kasar (CDR) angka kematian bayi (IMR) juga menunjukkan penurunan.

Kota Pekanbaru mencatat IPM tertinggi, yaitu 75,9 pada tahun 2005 diikuti oleh Kota Dumai, sedang IPM terendah tercatat Kabupaten Rohan Hilir sebesar 68,6. Hal ini sekaligus menunjukkan kesenjangan pembangunan manusia di kawasan perkotaan dan pedesaan, dimana komponen-komponen pembentuk IPM, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan indeks daya beli di perkotaan rata-rata lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.

Kondisi perekonomian Provinsi Riau dan kecenderungan perkembangannya padadasarnya didukung oleh sumber daya alam (resources base economy) yang dimiliki seperti perkebunan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan energi. Dengan potensi sumber daya alam yang be-

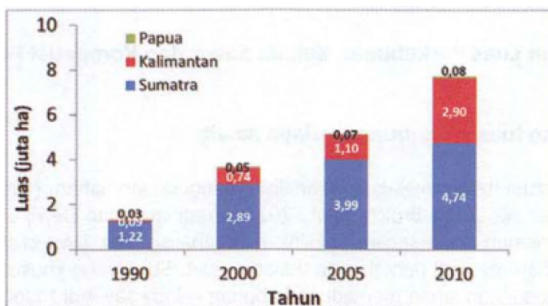
sar tersebut, maka pengelolaan yang efektif dan efisien akan memperkuat struktur perekonomian Provinsi Riau. Disamping hal tersebut Kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan juga menjadi penting bagi perkembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, pertambangan dan jasa kelautan seperti kepelabuhanan dan lainnya. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tanpa migas yang cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 8,28% per tahun selama periode tahun 2000-2004 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil dan cenderung meningkat. LPE dengan migas dengan LPE tanpa migas memiliki kecenderungan yang serupa, namun dengan laju lebih rendah karena laju pertumbuhan sektor pertambangan sangat rendah, yaitu 1,27% per tahun. LPE Provinsi Riau tanpa migas lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional. Jika pada tahun 2003 LPE Provinsi Riau tercatat sebesar 8,17% tahun 2005 sebesar 8,54% dan tahun 2006 sebesar 8,66%; LPE Nasional mencatat 5,69% pada tahun 2003, 6,48% pada tahun 2005, dan 6,04% pada tahun 2006.
- 2) Struktur perekonomian dengan migas selama periode 2003-2005 didominasi oleh sektor pertambangan, yaitu rata-rata sebesar 41-44%, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,70% dan sektor industri pengolahan sebesar 20,06% pada tahun 2005. Struktur perekonomian tanpa migas didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 38,17% pada tahun 2005, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,86% dan sektor perdagangan dan jasa sebesar 11,54%. Sektor pertanian dibentuk oleh subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
- 3) Pada tahun 2003 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas tercatat sebesar Rp 6,40 juta, tahun 2004 sebesar Rp 6,83 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp 7,60 juta; sedangkan migas pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp 16,50 juta, tahun 2004 sebesar Rp 16,64 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp 17,50 juta. Pendapatan perkapita atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2003 sebesar Rp 5,85 juta; sedangkan tahun 2004 sebesar Rp 6,25 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp 6,64 juta; sedangkan migas tahun 2003 sebesar Rp 15,09 juta, tahun 2004 sebesar Rp 15,21 juta, dan tahun 2005 sebesar Rp 15,71 juta.
- 4) Neraca perdagangan luar negeri dengan migas selama periode 2003-2005 menunjukkan posisi surplus, karena nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Laju perkembangan perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi yang berkepanjangan antara tahun 2000-2005 ditandai pertumbuhan positif dan negatif secara bergantian. Pada tahun 2005 tercatat pertumbuhan impor hingga 162,61% disebabkan oleh permintaan migas domestik yang cenderung meningkat. Pada tahun 2003 kegiatan ekspor-impor masih dilakukan melalui Batam dan Bintan, di samping pelabuhan Dumai, Buatan, Sungai Pakning, Perawang, Pekanbaru, dan Kuala Enok. Komoditas dengan nilai ekspor tertinggi adalah minyak bumi, crude palm oil, pulp and paper, crumb rubber, kertas dan barang dari kertas, minyak kelapa/kelapa, kayu lapis, dan kayu olahan. Tumbuhnya industri pengelolaan minyak sawit menjadi bahan setengah jadi (CPO) telah meningkatkan nilai ekspor.
- 5) Perkembangan investasi selama tahun 2000-2005 relatif belum stabil dan berfluktuasi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan investasi rata-rata selama periode 2000-2005 adalah sebesar 4,56%. Peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau nyatanya cukup signifikan, yakni sebesar 25,12%. Realisasi investasi PMDN pada tahun 2006 meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun 2005, sedang PMA hingga sepuluh kali lebih besar. Distribusi investasi. PMDN menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Indragiri Hulu merupakan wilayah yang memiliki nilai investasi terbesar. Sedang nilai

realisasiPMA terbesar berada pada Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak,dan Kota Dumai.

- 6) Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkat pendapatan asli Daerah Riau dan mampu mendorong perkembangan secara lebih luas, seperti Perdagangan, Industri, Jasa, Investasi, dan membuka kesempatan kerja.
- 7) Terbukanya pasar domestik dan regional bagi produk hortikultura telah mendorong perkembangan sektor transportasi dan kesempatan usaha lain.

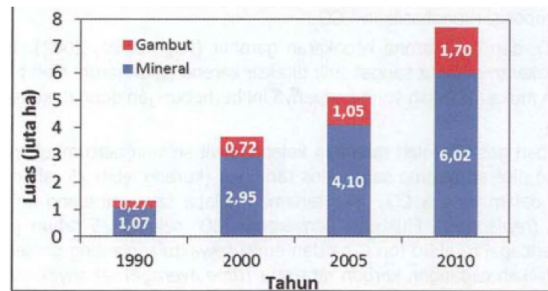
LUAS PERKEBUNAN



Sumber: Dinas pertanian kontroversi pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut

Lahan perkebunan kelapa sawit sangat berkembang dengan pesat, baik pada lahan mineral ataupun lahan gambut dalam tahun 2005 sampai dengan 2010 laju pertumbuhan dilahan gambut sudah mengalami peningkatan dua kali lipat dari (130.620 ha) dari periode sebelumnya sekitar (65.614 ha)

Kompetensi penggunaan lahan semakin meningkat dikarenakan semakin banyak permintaan terhadap baku yang menyebabkan meningkatnya intensitas penggunaan lahan , perluasan perkebunan kelapa sawit terjadi hampir semua penggunaan lahan lain seperti lahan hutan, semak belukar, maupun lahan pertanian, lahan pertanian yang cenderung digunakan relatif tinggi untuk pengembangan satu unit pabrik minyak kelapa sakit biasanya digunakan lahan seluas (6000 sampai dengan 7000 ha) untuk memasok tandan buah segar yang digunakan untuk pengelolaan minyak sawit.



Sumber: Dinas pertanian kontroversi pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut

Lahan yang digunakan dalam perkembangan kelapa sawit. Luas lahan karet dan pertanian campuran, sawah dan tegalan di Pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua.

Penggunaan lahan awal	2000-2005		2005-2010		2000-2010	
	Ha	%	ha	%	ha	%
Karet dan pertanian tanaman campuran	962.382	65	350.313	14	1.312.695	32
Sawah	21.278	1	8.830	0,3	30.107	1
Tegalan	34.596	2	129.929	5	164.525	4
Lain-lain	458.855	31	2.079.542	81	2.538.397	63
Jumlah ¹⁾	1.477.111	100	2.568.614	100	4.045.725	100

PERAN PEMERINTAH

Isu yang terkait dengan perkembangan kelapa sawit di Indonesia dimana yang disebut sebagai kelapa sawit tidak ramah lingkungan dan berhembus isu bahwa Indonesia adalah salah satu yang paling terbanyak menyumbang kerusakan lingkungan akibat memproduksi sawit. Kementerian Pertanian melakukan kampanye green product (produk ramah lingkungan) kelapa sawit ke Eropa yaitu Spanyol dan Perancis untuk mengantisipasi isu negatif tentang komoditas sawit terkait dengan masalah lingkungan. Pemerintah berharap dengan hadirnya ISPO ini sebagai sebuah bentuk baru perundang undangan mengenai kelapa sawit, diharapkan setiap pengusaha maupun stakeholder dalam sektor tersebut menyambut baik dengan hadirnya ISPO tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri juga menegaskan bahwa kebijakan internasional seperti halnya RSPO, tetap diijinkan untuk terus dilaksanakan tetapi hanya bersifat tidak wajib atau mandatory . Untuk itulah, para pengusaha dan pemilik perkebunan kelapa sawit Indonesia diwajibkan untuk memiliki dan mengantongi sertifikasi dari ISPO.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemerintahan daerah seharusnya berbasis pada identitas daerah yang merupakan modal spiritual (modal utama) dari suatu pembentukan tatanan. Modallainnya adalah modal sosial (Interkoneksi) dan modal fisik (antara lain berpaketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat) pendekatan perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan, konsisten padadokumen perencanaan, selama ini tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, Penyelenggaraan program pembangunan hampir tidak pernah mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dicantumkan pada dokumen perencanaan tersebut, karena pembangunan lebih diartikan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai sasaran-sasaran yang bersifat fisik pula, bukan pembangunan manusia (dalam arti sebenarnya) dan kelembagaannya yang lebih berdimensi budaya. Pendekatan pembangunan berbasis identitas sudah asing lagi paraperencana, pembangunan lebih banyak dimengerti sebagai pembangunan fisik yang bebas nilai, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan budaya. Kedua, keterbatasan wawasan paraperencana pada khususnya dan aparat pemerintah melihat pembangunan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai tujuan yang pada umumnya berdimensi fisik pula. Laju perubahan dalam sistem perencanaan yang relatif sangat cepat (terutama dalam era reformasi) membuat aparat belum mampu menyesuaikan diri. Di samping itu, sistem perencanaan yang diketengahkan belum sepenuhnya bebas dari cacat (metodologis, hukum dan lainnya). Ketiga, budaya dan kearifan lokal telah terkikis oleh kehidupan masyarakat yang hampir melupakan nilai-nilai budayanya secara murni, menggeser pemahaman nilai religius menjadi materialistis. Kehidupan sehari-hari masyarakat hampir tidak dinafasi lagi oleh spirit budayanya. Identitas komunitas (termasuk identitas lembaga-lembaga) kemasyarakatan tradisional pada dasarnya tidak kuat. Keempat, persepsi masyarakat dan kalangan aparat pemerintah yang belum sepenuhnya benar tentang fungsi dari identitas daerah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh karena pola pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang berbasis identitas masih relatif baru. Di bidang politik, kecenderungan yang sama juga terjadi. Lembaga-lembaga politik dalam bentuk partai politik berkembang sangat pesat dilihat

dari sisi jumlah. Hampir semua partai politik memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan di mayoritas kabupaten. Walaupun, ada kecenderungan bahwa partai-partai tersebut belum mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal, karena belum dilaksanakan pendidikan politik secara baik, apalagi menumbuhkan budaya politik yang demokratis sesuai nilai-nilai Budaya Lokal. Organisasi sosial politik belum mampu memberikan suasana yang kondusif dan cenderung memecah belah kekerabatan yang ada dimasyarakat, namun fenomena ini merupakan suatu proses pendewasaan berpolitik masyarakat. Kelembagaan daerah yang berwujud dalam struktur organisasi, masih belum menganut prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga dalam operasionalnya, aparat cenderung tidak mampu transparan dan akuntabel dalam pelayanannya. Hal ini seiring dengan tingkat kualitas aparat pemerintah daerah yang masih harus digenjut untuk dapat bekerja secara profesional. Kaitan lainnya karena rekrutmen dan penempatan jabatan structural belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian) Diakses Oktober 29, 2014, dari Direktorat jenderal P-erkebunan: <http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/component/content/article/36-news/204-wamentanpimpin-pertemuan-persiapan-ujilapang-konsep-sertifikasi-ispo.html>
- Harian Riau Pos, "Perusahaan Sawit Wajib Miliki Sertifikat ISPO", diterbitkan Senin, 03 Desember 2012.
- Sulistyanto, A. I., & Akyuwen, R. (2010). *Dinamika Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, "Menimbang Relevansi Sertifikasi RSPO", Jurnal Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Volume 31, Nomor 6, 2009, hal. 10
- Kampanye negative kelapa sawit Indonesia" dalam Jurnal Warta Ekspor: DJPEN/ MJL/002/06/2011 Edisi Juni.